

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah negara kepulauan paling besar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, di mana sekitar 6.000 pulau di antaranya adalah pulau yang berpenghuni. Kepulauan Indonesia menjadi pemisah antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Perairan Indonesia menjadi jalur perhubungan laut antara benua Asia dan benua Australia. Posisi Indonesia yang strategis juga berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di laut dan tiga di darat. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpotensi rawan terhadap ancaman militer dan non-militer. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia menjadikan sebuah tantangan besar dalam upaya pengamanannya (Sarjito, Ali, & Wijaya, 2018, pp. 85-86).

Detail dari ancaman terhadap keamanan maritim itu terbagi menjadi beberapa jenis seperti perompakan, pelayaran, instalasi lepas pantai, penyelundupan narkoba serta psikotropika ilegal, penyelundupan manusia, penangkapan ikan ilegal serta aktivitas-aktivitas laut lainnya yang dapat merusak laut. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep-konsep terkait keamanan maritim yang mana bisa menghubungkan potensi akan ancaman maritim dan hubungannya dengan kepentingan peningkatan keamanan maritim guna mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia (Masdiana, 2017, p. 48)

Dalam dimensi pertahanan dan keamanan, rintangan selalu dialami dalam menentukan batas-batas kekuasaan nasional bagi negara-negara kepulauan. Hal ini karena negara kepulauan mempunyai kebutuhan dalam mendapatkan kekayaan alam di laut, baik itu berupa hasil laut semacam perikanan maupun hasil kekayaan alam yang berada dalam perut bumi bisa berupa gas alam dan minyak bumi. Banyak kasus nyata akan persoalan batas-batas laut nasional seperti kasus Celah Timor, Laut Ambalat, Laut Tiongkok Selatan serta kasus Sipadan dan Ligitan. Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan ataupun konflik antar negara. Indonesia harus terus berusaha untuk memajukan kekuatan maritimnya guna menanggulangi beragam peluang dan ancaman yang melingkupi (Ali, Yudho, & Sianturi, 2021, p. 170).

Guna memelihara kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara, Indonesia perlu melibatkan seluruh komponen bangsa, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Dari konstelasi geografis, peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) serta kemampuan peperangannya maka TNI AL harus memiliki kesenjataan strategis dan memiliki daya tangkal yang tinggi berupa alat utama sistem senjata (alutsista). Salah satu alutsista yang memiliki nilai strategis tinggi adalah kapal selam. Dengan perkembangan teknologi kemiliteran semakin pesat saat ini kapal selam dapat bertahan di dalam air selama berbulan-bulan sehingga dapat memotong jalur logistik lawan (OkeZone.com, 2018).

Kedaulatan dan kekuatan sebuah negara dapat dicerminkan dari sistem pertahanannya. Saat sebuah negara memiliki kemampuan dalam memperkuat

sistem keamanan dan pertahanannya, semakin kuat pula kedaulatan negara itu. Lain halnya jika sebuah negara memiliki sistem pertahanan yang lemah serta kurang mempunyai keahlian dalam melakukan kegiatan militer serta keamanan, maka ancaman yang didapatkan negara tersebut dapat semakin tinggi terjadi dan bisa membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sebuah negara untuk memperkuat sistem pertahanannya, baik itu untuk negara maju maupun negara berkembang (Andalus & Djuyandi, 2022, p. 176).

Salah satu cara memperkuat sistem pertahanan adalah dengan memperkuat alutsistanya, kapal selam merupakan salah satu alutsista yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara. Kapal selam bukan lah untuk ajang gagah-gagahan ataupun untuk mengancam siapapun akan tetapi sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang layak guna menjaga kedaulatan, tumpah darah, kesatuan, dan keutuhan kawasan. Kapal selam menjadi salah satu strategi membangun kekuatan pertahanan terutama Matra Laut, kapal selam diharap dapat memperkuat Alutsista TNI terutama dibagian Angkatan Laut sehingga mampu meningkatkan *deterrent effect* (efek jera) untuk pertahanan Indonesia (Finaka, 2021).

Sebelumnya, Indonesia memiliki lima kapal selam yaitu KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, KRI Ardadeli 404 dan KRI Alugoro 405. Namun pada tanggal 21 April 2021 lalu, KRI Nanggala 402 diinfokan kehilangan kontak saat akan melakukan latihan menembak torpedo. KRI Nanggala 402 disebutkan mengalami *subsun*k (sudah pasti tenggelam). Kejadian hilangnya salah satu kapal selam milik Indonesia ini membuat kekuatan alutsista laut Indonesia

semakin berkurang dengan adanya hal itu sehingga membuat semakin jauh dari target pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) (Fathan, 2021).

MEF adalah sebuah amanat pembangunan nasional di bagian bidang pertahanan keamanan dengan langkah-langkah strategis dan pokok-pokok pikiran yang direkomendasikan untuk mewujudkan sebuah kekuatan pokok minimum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan sebagai bagian postur ideal dalam pertahanan negara. Kepentingan utama dari dilakukannya penyesuaian MEF adalah guna mengoreksi faktor-faktor seperti perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan agar tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara dan juga pastinya sesuai dengan tataran kewenangan. Untuk mempercepat mengatasi masalah deviasi peruntukan anggaran MEF maka perlu mengambil upaya terobosan dengan melakukan penyesuaian untuk mewujudkan pencapaian MEF. MEF adalah sebuah strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju tahap ideal dan tidak diperuntukan untuk konsep perlombaan senjata, tetapi lebih sebagai sebuah wujud kekuatan pokok yang memenuhi standar dan mempunyai efek tangkal (Kementerian Pertahanan, 2016).

Pemenuhan Alutsista serta pembangunan postur pertahanan Indonesia telah dirumuskan dalam sebuah rencana strategis untuk memenuhi MEF. Gagasan utama serta langkah-langkah tentang rencana strategis tersebut telah dijelaskan secara detail dalam *Strategic Defence Review* (SDR) pada tahun 2009 yang mana telah dicatat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 mengenai kebijakan pertahanan negara tentang minimum essential

force komponen utama. Setelah itu, MEF ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 hingga 2014. Sebagaimana merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014, MEF dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2010-2014, tahap kedua pada tahun 2015-2019, tahap ketiga pada tahun 2020-2024 (Santiko & Agustien, 2022, p. 78).

Setiap negara di dunia wajib memiliki kapal selam sebagai senjata pamungkas dalam perang laut, kapal selam tidak hanya dipakai untuk keperluan militer saja akan tetapi bisa juga dipakai untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar serta mempunyai tugas untuk mencapai kedalaman yang tidak dapat digapai oleh penyelam manusia. Melihat kemampuan akan kekuatan kapal selam tersebut tidak sedikit negara memutuskan untuk menjadikan kapal selam sebagai armada pertahanan bagi negara mereka. Negara-negara adidaya pun saling berlomba-lomba untuk memiliki kapal selam terbanyak di dunia, agar bisa menunjukan kehebatan dan kekokohan pertahanan negara masing-masing. Berikut adalah tabel berisi list kepemilikan kapal selam dari negara pemilik kapal selam terbanyak.

Tabel 1.1 Kepemilikan Kapal Selam di 43 negara tahun 2023

| No. | Negara | Jumlah Kepemilikan Kapal selam |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| 1. | Tiongkok | 78 unit |
| 2. | Rusia | 70 unit |
| 3. | Amerika Serikat | 68 unit |
| 4. | Korea Utara | 35 unit |
| 5. | Korea Selatan | 22 unit |
| 6. | Jepang | 21 unit |
| 7. | Iran | 19 unit |
| 8. | India | 18 unit |
| 9. | Turki | 12 unit |

| | | |
|-----|----------------|-----------------|
| 10. | Greece | 11 unit |
| 11. | Inggris | 10 unit |
| 12. | Perancis | 9 unit |
| 13. | Pakistan | 9 unit |
| 14. | Mesir | 8 unit |
| 15. | Italia | 8 unit |
| 16. | Brazil | 7 unit |
| 17. | Aljazair | 6 unit |
| 18. | Australia | 6 unit |
| 19. | Jerman | 6 unit |
| 20. | Norwegia | 6 unit |
| 21. | Peru | 6 unit |
| 22. | Vietnam | 6 unit |
| 23. | Israel | 5 unit |
| 24. | Singapura | 5 unit |
| 25. | Swedia | 5 unit |
| 26. | Azerbaijan | 4 unit |
| 27. | Kanada | 4 unit |
| 28. | Chile | 4 unit |
| 29. | Kolombia | 4 unit |
| 30. | Indonesia | 4 unit |
| 31. | Belanda | 4 unit |
| 32. | Taiwan | 4 unit |
| 33. | Afrika Selatan | 3 unit |
| 34. | Argentina | 2 unit |
| 35. | Bangladesh | 2 unit |
| 36. | Ekuador | 2 unit |
| 37. | Malaysia | 2 unit |
| 38. | Myanmar | 2 unit |
| 39. | Portugal | 2 unit |
| 40. | Spanyol | 2 unit |
| 41. | Venezuela | 2 unit |
| 42. | Kuba | 1 unit |
| 43. | Polandia | 1 unit |
| | TOTAL | 505 unit |

Sumber: (Global Fire Power, 2023)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan terdapat 505 unit keseluruhan kapal selam yang dioperasikan di 43 negara. Kapal selam tersebut tidak hanya dimiliki oleh negara-negara adidaya, tetapi juga ditemukan di seluruh penjuru benua. Berdasarkan jumlahnya, negara-negara yang memiliki kapal selam terbanyak adalah Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Korea Utara, dan Korea Selatan.

Sementara untuk negara-negara maritim, jumlah kapal selam terbanyak dimiliki oleh Jepang, Inggris, Indonesia dan Kuba (Global Fire Power, 2023).

Dalam rencana pemenuhan MEF tahun 2020-2024, TNI AL memiliki target untuk memiliki sebanyak delapan unit kapal selam. Usaha dalam pemenuhan MEF itu sendiri dikarenakan MEF adalah sebuah standar kekuatan utama dan minimum bagi TNI yang mutlak dan harus disiapkan sebagai syarat utama dalam terlaksananya efektivitas tugas utama dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman actual. Untuk memenuhi target tersebut dinilai cukup sulit, pada MEF tahap kedua target akan pencapaian program pemenuhan MEF untuk ketiga matra TNI masih mencapai angka 63,19 persen dengan target awal yang seharusnya mencapai 75,54 persen di akhir MEF tahap kedua. Untuk kedepannya, tidak hanya memikirkan pencapaian target pengadaan alutsista saja, akan tetapi harus juga memikirkan faktor-faktor perkembangan seperti aspek geopolitik, perkembangan teknologi, ancaman Gerakan separatis, aksi terorisme, ancaman disintegrasi bangsa serta ancaman-ancaman terbaru yang berpengaruh akan kedaulatan negara dan operasi militer lain. Selain faktor-faktor tersebut kita juga memerlukan upaya dan komitmen dengan pemerintah, TNI dan DPR dalam pencapaian target MEF tahun ketiga yang akan berakhir pada akhir tahun 2024 mendatang (Nasrudin, 2022).

Sebagai negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang, namun memiliki sistem pertahanan yang masih sangat kurang memadai baik dari segi jumlah kekuatan udara maupun laut, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan *total defense* yang mencakup batas terluar negara hingga zona ekonomi eksklusif

(ZEE). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai memperkuat dan mengembangkan pertahanan maritimnya melalui cara *transfer of technology* (ToT) ataupun melakukan pembelian armada laut dari negara-negara lain. Salah satu negara yang dijadikan sebagai tujuan kerja sama pembangunan pertahanan maritim ini ialah Korea Selatan (Meidiani, 2018).

Indonesia menentukan pilihan menjadikan Korea Selatan sebagai mitra pembelian kapal selam karena beberapa faktor. *Pertama*, harga yang lebih murah. *Kedua*, mitra yang mumpuni dari segi kualitas. *Ketiga*, mitra yang bersedia membagi ilmu dengan cara ToT. Untuk tiga buah kapal selam dari Korea Selatan, Indonesia cukup membayar sebesar US\$ 1 miliar saja, dibandingkan dengan kapal selam dari negara lain yang per unitnya dibanderol dengan harga US\$ 450-500 juta. Tidak hanya karena harga, bagi Indonesia, Korea Selatan adalah mitra kerja sama yang mumpuni dari segi kualitas. Dalam setiap pengadaan, Korea selalu cepat dalam pengiriman barang. Apabila barang dibeli dalam kondisi rusak pun masih dapat diperbaiki. Selain itu, Korea Selatan juga memakai skema ToT dengan PT PAL, di mana hasil dari skema ToT ini ke depannya dapat digunakan oleh PT PAL untuk membuat kapal selam sendiri (Julaikah, 2014).

Kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan kapal selam sebagai proyek alutsista DSME-209/1400 Submarine (Changbogo Class) merupakan kebijakan untuk memperkuat visi pengadaan kapal selam Indonesia pada tahun 2024 dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) terkait pembuatan kapal selam. Dengan demikian, kerja sama ini bukan sekadar pembelian alutsista, melainkan juga merupakan bagian dari kebijakan

strategis Indonesia dalam mewujudkan kemandirian maritim di masa yang akan datang. Kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan mengedepankan skema ToT untuk mendukung kemandirian dan kemajuan industri serupa di dalam negeri yang dipimpin pengembangannya oleh PT PAL Indonesia (Al-Fadhat & Aziz, 2019, pp. 381-389).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa mempengaruhi berbagai faktor, baik ekonomi, politik, maupun keamanan nasional, Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman di laut. Maka dari itu, Indonesia harus melengkapi standar MEF untuk alutsista kapal selam guna memaksimalkan keamanan laut Indonesia. Pada saat ini, Indonesia memiliki empat kapal selam yang tersisa setelah salah satu dari total lima kapal selam sebelumnya telah hilang pada pada hari tanggal 21 April 2021 yang mana hilangnya sekitar sebulan setelah kapal selam kelima diresmikan pada tanggal 17 Maret 2021, kapal selam kelima itu adalah kapal selam Alugoro. Akibat dari semakin berkurangnya kapal selam TNI AL maka semakin bertambah pula target jumlah kapal selam yang harus dipenuhi yang dilansir memerlukan delapan kapal selam untuk memenuhi target MEF, peneliti ingin melihat apakah kerja sama industri pertahanan Indonesia-Korea Selatan akan berhasil memenuhi target kebutuhan MEF tahap ketiga.

Dilihat dari data-data dan informasi di atas, sesuai dengan permasalahan yang ada, maka topik pembahasan penelitian ini peneliti anggap layak untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti akan meneliti permasalahan tersebut pada pemenuhan

target MEF tahap ketiga, yakni pada periode 2020-2024. Ukuran dari pemenuhan target tersebut adalah memenuhi 100 persen target MEF pada akhir tahun 2024, penguatan kemampuan akan pertahanan negara dengan indikator kinerja utama yakni pemenuhan MEF dan kontribusi Industri pertahanan telah masuk kedalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, keseluruhan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini akan penulis buat berdasarkan periode yang telah ditentukan. Hal tersebut agar data yang diberikan adalah data terbaru sehingga solusi yang diberikan nantinya bisa lebih tepat sasaran.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, secara spesifik peneliti ini mengangkat sebuah pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana kerja sama industri pertahanan Indonesia-Korea Selatan dalam pengadaan alutsista kapal selam untuk memenuhi target MEF 2020-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk memenuhi target MEF tahap ketiga pada tahun 2020-2024 dalam pengadaan alutsista kapal selam. Hal ini mengingat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengadaan alutsista negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua, yang mana adalah manfaat teoritis serta manfaat praktis dengan uraian seperti di bawah ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengaplikasikan teori dan konsep-konsep dalam kajian Hubungan Internasional untuk memahami bagaimana kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan negara lain dalam memenuhi target pertahanan negara.
2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi para mahasiswa maupun penulis lain dalam ilmu hubungan internasional terpaut masalah pencapaian target negara dengan melakukan kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang terdapat dalam penelitian ini ialah :

1. Sebagai gambaran mengenai pembuatan kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam bidang keamanan maritim.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi para aktor yang terlibat dalam sebuah kerja sama antara Indonesia-Korea Selatan dalam penyediaan kapal selam untuk mencapai target yang telah disepakati.
3. Sebagai rekomendasi strategis kepada pemerintah Indonesia dalam bekerja sama untuk pengadaan alusista kapal selam.

1.4.3 Sistematika Penulisan

Penelitian ini di rancang untuk menjelaskan kerangka dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut terdiri dari alasan peneliti mengambil permasalahan dan dinilai signifikan untuk diangkat sebagai masalah yang perlu diteliti dan digali lebih dalam sebagai bahan kajian ilmiah.

BAB I LATAR BELAKANG

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat sedikit ulasan tentang kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam memenuhi target MEF tahap ketiga beserta gambaran dan upaya yang di lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam bab ini dituliskan tujuan dan manfaat dari penulisan ini baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca mengerti secara singkat akan pembahasan yang terdapat dalam bab di penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi akan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti tulis, dengan adanya penelitian terdahulu maka hasil penelitian akan lebih relevan dengan pembanding yang dapat membedakan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam bab ini juga tertulis landasan teori dan konsep yang peneliti pakai yang dapat digunakan sebagai pisau analisi dalam sebuah penelitian, akan dituliskan juga

kerangka pemikiran yang menjadi alur pemikiran peneliti terhadap penelitian yang ditulis secara sistematis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai cara penelitian yang akan peneliti pakai, baik itu dari sudut pandang peneliti, pendekatan penelitian yang diambil, jenis penelitian, unit analisis, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data serta Teknik keabsahan data yang mana semuanya akan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dijadikan sebuah metode penelitian, sehingga bisa menjawab permasalahan yang akan peneliti ajukan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah dianalisa terlebih dahulu lalu diuraikan dengan mendetail dan juga dibantu dengan rincian-rincian dari bab sebelumnya terpaut kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam mencapai target MEF tahap ketiga

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan juga jawaban akan pertanyaan penelitian yang dibantu dengan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga akan berisi saran-

saran rekomendasi untuk masyarakat, akademisi ataupun pimpinan negara dalam memenuhi target yang telah ditentukan oleh negara.

